



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keadaan perekonomian di Indonesia seperti sekarang ini, pemerintah harus dapat meningkatkan pendapatan negara guna untuk terus membangun infrastruktur Negara Indonesia demi tercapainya kesejahteraan seluruh rakyatnya. Salah satu pemerintah yang berkontribusi dalam proses pembangunan negeri ini adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus mampu meningkatkan pendapatannya melalui penerimaan pajak, salah satu jenis pajak yang dapat meningkatkan pendapatan Pemprov DKI Jakarta adalah pajak daerah. Pajak daerah provinsi DKI Jakarta diatur dalam Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010, atas perubahan Undang-Undang no 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam aturan tersebut Pajak Daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap



wilayah yang ada di provinsi DKI Jakarta. Ketentuan peraturan tersebut harus mampu mengakomodir kepentingan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan fungsi regulend tanpa mengurangi fungsi budgetair pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta bahwa rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan selalu lebih tinggi pada setiap tahunnya, namun pada saat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pemprov DKI Jakarta mendapati bahwa ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi. Masalah yang timbul ialah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor lebih rendah dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Jika kita melihat keadaan sektor transportasi saat ini bahwa jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta terbilang cukup tinggi, hal ini terlihat dengan adanya penumpukan jumlah kendaraan bermotor disetiap jaringan jalan yang menyebabkan kemacetan. Berarti seharusnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor haruslah lebih tinggi. Mungkin dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor. Terlebih disaat adanya razia kendaraan bermotor mengenai pajak kendaraan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh jajaran kepolisian wilayah DKI Jakarta. Kepolisian mendapati beberapa kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan nya tepat pada waktunya terutama jenis kendaraan sepeda motor. Hal ini menyebabkan kepolisian harus menindak pengendara yang telat membayar pajak kendaraan nya dengan memberi peringatan berupa surat tilang.

Beberapa waktu lalu tepatnya bulan februari 2017 hingga agustus 2017 Pemprov DKI Jakarta bersama badan pajak dan retribusi daerah ikut berpartisipasi memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan keringanan denda hingga pembebasan denda bagi setiap masyarakat yang telat ataupun tidak pernah membayar pajak kendaraan bermotor.



Dengan adanya kebijakan Pemprov DKI Jakarta dan jajaran kepolisian yang turut serta membantu mengumpulkan dana pajak kendaraan bermotor tersebut sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berarti penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor-faktor lain, selain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor dan kurangnya pengetahuan tentang membayar pajak.

Beberapa faktor lain yang sering mempengaruhi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor bermacam-macam mulai dari faktor pendapatan yang diterima masyarakat, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang mendominasi, hingga faktor jumlah penduduk yang kurang pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak guna memajukan pembangunan di wilayah DKI Jakarta demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Berdasarkan data kependudukan dari BPS menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta termasuk ke dalam tujuh provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar di Indonesia yaitu pada tahun 2016 sebesar 10.277.628 jiwa. Dengan luas wilayah 662.33 km² menjadikan kependudukan provinsi DKI Jakarta tergolong padat. Keadaan ini memicu meningkatnya kegiatan perekonomian di DKI Jakarta terutama tingkat pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk. Tingkat pendapatan penduduk diperoleh dari total pendapatan suatu daerah di bagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut, maka akan didapatkan ukuran pendapatan per kapita yang diterima setiap penduduk namun angka tersebut sering kali diganti dengan PDRB atas dasar harga pasar di bagi dengan jumlah penduduk, maka akan di dapatkan PDRB per kapita.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pendapatan regional dari BPS menunjukkan bahwa provinsi DKI Jakarta menjadi urutan pertama dengan tingkat PDRB tertinggi diantara provinsi lainnya Hal ini dapat dilihat setiap penduduk DKI Jakarta mampu memenuhi setiap kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan transportasi yaitu memiliki kendaraan bermotor secara pribadi. Oleh karena itu di perlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahun nya yang tidak sesuai target yang sebelumnya telah direncanakan sehingga mampu meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan judul **“Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita, Peraturan Pajak Progresif, dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Wilayah DKI Jakarta tahun 2010-2016”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya tentang pajak kendaraan bermotor di provinsi DKI Jakarta memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sehubungan dengan itu, target pajak yang terus ditingkatkan setiap tahunnya dan realisasi yang telah dicapai selalu melebihi target yang telah ditentukan mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan masih jauh dari potensi yang bisa didapatkan sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari rumusan permasalahan tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :



1. Apakah terdapat pengaruh antara PDRB per kapita terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pertumbuhan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh antara peraturan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh antara PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka pokok-pokok permasalahan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah PDRB per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah peraturan pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor.

D. Batasan Penelitian

Adapun batasan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek objek penelitian adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah DKI Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Lingkup penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah DKI Jakarta, dan laporan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

3. Periode waktu dalam penelitian ini didapatkan selama 7 tahun yaitu tahun 2010-2016.

4. Untuk peraturan pajak progresif menggunakan peraturan pajak progresif terbaru tahun 2015, dalam peraturan tersebut kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan nama dan alamat yang sama dalam satu kartu keluarga akan dikenakan tarif pajak progresif.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah ialah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara langsung antara PDRB per kapita, pajak progresif kendaraan bermotor, dan pertumbuhan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

2. Untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak progresif kendaraan bermotor dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta.



G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dibidang penelitian ilmiah dan melatih kemampuan penulis untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis, serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis sehingga dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Bagi aparat pajak

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan masukan-masukan guna meningkatkan pendapatan pajak daerah DKI Jakarta.

3. Bagi civitas akademika Kwik Kian Gie School of Business

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan referensi bagi beberapa penelitian dengan objek penelitian yang sejenis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.